PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING*, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DANA BOS DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI MODERASI

(STUDI EMPIRIS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KOTA PONTIANAK)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

AGUNG PRABOWO
NIM. B2091231003

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, *WHISTLEBLOWING*, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN DANA BOS DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI MODERASI

(STUDI EMPIRIS SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SWASTA DI KOTA PONTIANAK)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister

AGUNG PRABOWO
NIM. B2091231003

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Agung Prabowo
NIM	:	B2091231003
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi (Studi Empiris Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Di Kota Pontianak).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat darikarya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Pontianak, Januari 2025



Agung Prabowo
NIM. B2091231003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Agung Prabowo
NIM	:	B2091231003
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi (Studi Empiris Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta Di Kota Pontianak).

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak hasil karya tulisan orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Akuntansi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Pontianak, Januari 2025



Agung Prabowo
NIM. B2091231003

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS dengan Moralitas Individu sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Pontianak)

ini diajukan oleh:

Nama	:	Agung Prabowo
NIM	:	B2091231003
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian	:	31 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam ujian Tesis dan Komprehensif untuk memenuhi gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., AscanCPA., CIM. NIP. 197210012006041001	25/02/25	
Pembimbing II	H. Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA. NIP. 196808211997021003	25/02/25	
Penguji I	Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. NIP. 197307311997022001	21/02/25	
Penguji II	Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CFrA., CMA. NIP. 198207192005011001	24/02/25	

Pontianak, Februari 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi
Magister Akuntansi FEB UNTAN

Elok Henawati, S.E., M.Si., Ak., Ph.D., CA.
NIP. 197402122000122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS dengan Moralitas Individu sebagai Moderasi (Studi Empiris pada Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Pontianak)."

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Pascasarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperoleh gelar Magister (S2) Akuntansi, sebagai wujud dari pencapaian akademik dan kontribusi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pengelolaan dana BOS dan pencegahan kecurangan di sektor pendidikan.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, penulis telah menerima berbagai bantuan, dukungan, bimbingan, serta dorongan yang sangat berarti dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Barkah, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Elok Heniwati, S.E, M.Si., Ak., Ph.D., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi.
4. Dr. Muhsin, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., AseanCPA., CIM. selaku dosen pembimbing utama tesis, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.

5. H. Rudy Kurniawan, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku dosen pembimbing pendamping, yang dengan penuh perhatian dan komitmen telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berarti dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Dr. Nella Yantiana, S.E., M.M., Ak., CA., CMA., CPA. selaku dosen penguji, yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
7. Dr. Juanda Astarini, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CFrA., CMA. selaku dosen penguji, yang telah memberikan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, serta kepada seluruh staf administrasi Program Studi Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura atas segala bantuan dan dukungannya.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yang telah memberikan izin dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penelitian ini.
10. Kepala Sekolah dan Bendahara BOS SD Negeri dan Swasta di Kota Pontianak, yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang sangat berarti dalam kelancaran penelitian ini.
11. Orang tua dan saudara tercinta, khususnya kepada Ibu Sri dan Mbak Tutik Setyowati yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan tanpa henti baik moril maupun materil sepanjang penulis menjalani studi hingga selesainya penulisan tesis ini.
12. Uray Annisya Zuliya sebagai pasangan terkasih, yang telah memberikan dukungan semangat dan telah banyak membantu dalam proses penyusunan serta penyelesaian tesis ini.
13. Teman-teman mahasiswa Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura angkatan XIX, atas persahabatan yang penuh rasa kekeluargaan, serta sumbangan pikiran dan pengalaman yang berharga selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut memberikan bantuan dan kontribusi sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses pembuatan dan penyelesaian tesis ini. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pontianak, Januari 2025

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing,* dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dibagikan secara langsung kepada responden dan diukur menggunakan skala *likert*. Data diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Bendahara BOS Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kota Pontianak, dan didapatkan sebanyak 50 responden. Metode analisis data diuji dengan menggunakan aplikasi WarpPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi Pegawai berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 2) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 3) *Whistleblowing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 4) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 5) Moralitas Individu tidak mampu memoderasi Kompetensi Pegawai terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 6) Moralitas Individu mampu memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 7) Moralitas Individu mampu memoderasi *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS. 8) Moralitas Individu tidak mampu memoderasi Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan dana BOS.

Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, W*histleblowing,* Komitmen Organisasi, Pencegahan Kecurangan, Moralitas Individu.

ABSTRACT

The purpose of this study was to test and analyze employee competence, internal control systems, whistleblowing, and organizational commitment to fraud prevention with individual morality as the moderating variable. This study is a quantitative study using primary data collected through a questionnaire survey using a purposive sampling technique that was distributed directly to respondents and measured using a Likert scale. Data was collected by distributing questionnaires to the School Operational Assistance (BOS) Treasurer of Public and Private Elementary Schools in Pontianak City, and obtained 50 respondents. The data analysis method was tested using the WarpPLS application. The results of this study indicate that: 1) Employee Competence has a negative and insignificant effect on School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud Prevention. 2) Internal Control Systems have a positive and significant effect on School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud Prevention. 3) Whistleblowing has a positive and significant effect on School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud Prevention. 4) Organizational Commitment has a positive and significant effect on School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud Prevention. 5) Individual Morality is unable to moderate Employee Competence on School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud Prevention. 6) Individual Morality is able to moderate the Internal Control System towards the Prevention of School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud. 7) Individual Morality is able to moderate Whistleblowing towards the Prevention of School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud. 8) Individual Morality is not able to moderate Organizational Commitment towards the Prevention of School Operational Assistance (BOS) Fund Fraud.

Keywords: Employee Competence, Internal Control System, Whistleblowing, Organizational Commitment, Fraud Prevention, Individual Morality.

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan anggaran pendidikan oleh Kemendikbudristek merupakan aspek penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan minimal 20% APBN untuk pendidikan, termasuk melalui Dana BOS, yang mengalami peningkatan anggaran dalam lima tahun terakhir, mencapai Rp59,49 triliun pada 2024. Namun, dana BOS rentan terhadap penyalahgunaan, seperti mark-up anggaran, laporan fiktif, dan penggunaan di luar Rencana Kerja Sekolah (RKS). Data ICW menunjukkan korupsi sektor pendidikan terus meningkat, dengan 40% kasus pada 2023 terkait penyalahgunaan dana BOS. Kasus di berbagai sekolah di Jawa Barat dan Kalimantan Barat mencerminkan besarnya kerugian negara akibat praktik ini. Korupsi dana BOS tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat operasional sekolah, memperburuk ketidakmerataan akses pendidikan, dan merusak akuntabilitas sistem pendidikan. Pencegahan kecurangan memerlukan peningkatan kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal yang kuat, penerapan whistleblowing, serta komitmen organisasi. Moralitas individu juga berperan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Upaya ini penting untuk memastikan dana pendidikan benar-benar digunakan sesuai tujuan, guna menciptakan generasi yang berkualitas dan berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dalam meningkatkan transparensi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antar variabel. Populasi penelitian mencakup Bendahara BOS di SD Negeri dan Swasta di Kota Pontianak, dengan sampel 50 orang yang dipilih melalui purposive sampling. Variabel independen meliputi Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Komitmen Organisasi, sedangkan variabel dependen adalah Pencegahan Kecurangan Dana BOS, dengan Moralitas Individu sebagai variabel moderasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner berbasis skala Likert, dengan data primer berasal dari responden dan data sekunder dari literatur relevan. Analisis data menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0 dengan metode regresi berganda berbasis Partial Least Squares (PLS). Uji validitas dan reliabilitas dilakukan melalui analisis model pengukuran (outer model) mencakup validitas konvergen yang diuji melalui nilai *loading factor*, validitas diskriminan yang diukur menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE), serta uji reliabilitas yang melibatkan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. sementara analisis model struktural (inner model) mengukur kecocokan model dan pengaruh antar variabel *Average Path Coefficient* (APC), *Average R-square* (ARS), dan *Average Variance Factors* (AVIF), serta menilai *goodness of fit* (GoF). Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, sedangkan *predictive relevance* (Q^2) digunakan untuk menilai kemampuan prediktif

model. Tahap akhir dari analisis ini adalah pengujian hipotesis untuk memastikan hubungan antar variabel dalam penelitian.

3. Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 50 Bendahara BOS di SD Negeri dan Swasta di Kota Pontianak. Mayoritas responden adalah perempuan (64%), sementara 36% lainnya laki-laki. Sebagian besar berusia 31-40 tahun (44%) dan 20-30 tahun (38%), sedangkan 16% berusia 41-50 tahun, dan hanya 2% yang berusia di atas 50 tahun. Dari segi pendidikan, 92% memiliki gelar DIV/S1, sementara 4% berpendidikan D-III dan 4% S2. Terkait pengalaman kerja, 52% responden memiliki masa kerja di bawah 5 tahun, sedangkan 48% bekerja selama 5-15 tahun. Para responden tersebar di beberapa kecamatan di Kota Pontianak, dengan jumlah terbanyak dari Pontianak Kota (28%), diikuti Pontianak Tenggara (16%), serta kecamatan lainnya seperti Pontianak Barat, Selatan, dan Timur. Mayoritas responden berasal dari SD Negeri (68%), sedangkan 32% lainnya dari SD Swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan. Namun, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu, Moralitas Individu tidak memperkuat hubungan antara Kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi dengan Pencegahan Kecurangan, tetapi memperkuat pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing. Uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa model penelitian memenuhi kriteria yang baik, dengan nilai loading factor $\geq 0,7$ serta AVE $> 0,5$. Model ini dapat menjelaskan 74,9% variabel dependen (Pencegahan Kecurangan) dengan Q^2 sebesar 0,789, yang mengindikasikan model prediksi yang kuat.

4. Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dana BOS. Sebaliknya, sistem pengendalian internal, whistleblowing, dan komitmen organisasi berperan penting dalam mencegah kecurangan. Moralitas individu terbukti memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal dan whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan, tetapi tidak memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dan pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk memperkuat sistem pengendalian internal, menerapkan mekanisme whistleblowing yang efektif, serta meningkatkan komitmen organisasi guna mencegah penyalahgunaan dana BOS. Meski kompetensi pegawai tidak berpengaruh signifikan, peningkatan kapasitas mereka tetap diperlukan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Keterbatasan penelitian ini mencakup cakupan wilayah yang terbatas, jumlah responden yang sedikit, serta tidak adanya perbedaan analisis antara Sekolah Dasar Negeri dan Swasta. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak sekolah dari berbagai daerah dan mempertimbangkan faktor lain seperti budaya organisasi serta sistem teknologi informasi. Penggunaan metode campuran dan pemisahan analisis antara Sekolah Dasar Negeri dan Swasta juga dianjurkan untuk menghasilkan strategi pencegahan yang lebih akurat dan efektif.

SUMMARY

1. Background

The management of education budgets by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) is a crucial aspect of improving education quality in Indonesia. The government allocates at least 20% of the state budget (APBN) for education, including through the School Operational Assistance Fund (BOS), which has increased over the past five years, reaching IDR 59.49 trillion in 2024. However, BOS funds are highly susceptible to misuse, such as budget mark-ups, fictitious reports, and expenditures outside the School Work Plan (RKS). Data from Indonesia Corruption Watch (ICW) indicate a rising trend in education sector corruption, with 40% of cases in 2023 related to BOS fund misappropriation. Cases in various schools in West Java and West Kalimantan highlight the significant financial losses due to these fraudulent practices. The corruption of BOS funds not only harms state finances but also disrupts school operations, exacerbates educational inequality, and undermines the accountability of the education system. Fraud prevention requires strengthening employee competence, implementing robust internal control systems, adopting effective whistleblowing mechanisms, and fostering organizational commitment. Individual morality also plays a role in enhancing transparency and accountability in BOS fund management. This study aims to provide insights into improving transparency and accountability in managing BOS funds.

2. Research Methodology

This study employs a quantitative method with a causal-comparative approach to analyze cause-and-effect relationships among variables. The research population consists of BOS treasurers from public and private elementary schools in Pontianak City, with a sample of 50 respondents selected through purposive sampling. The independent variables include Employee Competence, Internal Control Systems, Whistleblowing, and Organizational Commitment, while the dependent variable is BOS Fund Fraud Prevention, with Individual Morality as a moderating variable. Data were collected through a Likert-scale-based questionnaire, with primary data from respondents and secondary data from relevant literature. Data analysis was conducted using WarpPLS 8.0 software with a multiple regression model based on Partial Least Squares (PLS). Validity and reliability tests were carried out through measurement model analysis (outer model), including convergent validity assessed through factor loadings, discriminant validity measured using Average Variance Extracted (AVE), and reliability tests using Cronbach's Alpha and Composite Reliability. Structural model analysis (inner model) was performed to evaluate model fit and variable relationships using Average Path Coefficient (APC), Average R-square (ARS), and Average Variance Factors (AVIF), along with goodness-of-fit (GoF) assessment. Additionally, the coefficient of determination (R^2) was used to measure the extent to which independent variables influence the dependent variable, while predictive

relevance (Q^2) assessed the model's predictive capability. The final stage involved hypothesis testing to confirm relationships among research variables.

3. Result Of The Research

This study involved 50 BOS treasurers from public and private elementary schools in Pontianak City. The majority of respondents were female (64%), while 36% were male. Most were aged 31–40 years (44%), followed by 20–30 years (38%), 41–50 years (16%), and over 50 years (2%). In terms of education, 92% held a bachelor's degree (DIV/S1), while 4% had a diploma (D-III), and another 4% held a master's degree (S2). Regarding work experience, 52% had less than five years of experience, while 48% had five to 15 years. Respondents were distributed across various districts in Pontianak, with the highest concentration in Pontianak Kota (28%), followed by Pontianak Tenggara (16%) and other districts such as Pontianak Barat, Pontianak Selatan, and Pontianak Timur. Most respondents came from public elementary schools (68%), while 32% were from private schools. The findings indicate that Employee Competence does not significantly influence Fraud Prevention. However, Internal Control Systems, Whistleblowing, and Organizational Commitment positively and significantly affect fraud prevention. Additionally, Individual Morality does not moderate the relationship between Employee Competence and Organizational Commitment with Fraud Prevention but strengthens the effect of Internal Control Systems and Whistleblowing. Validity and reliability tests confirmed that the research model met good criteria, with a factor loading value of ≥0.7 and AVE >0.5. The model explains 74.9% of the dependent variable (Fraud Prevention), with a Q^2 value of 0.789, indicating a strong predictive model.

4. Conclusion Of The Research

This study concludes that employee competence does not significantly influence BOS fund fraud prevention. Conversely, internal control systems, whistleblowing mechanisms, and organizational commitment play crucial roles in preventing fraud. Individual morality enhances the effectiveness of internal control systems and whistleblowing but does not moderate the relationship between organizational commitment and fraud prevention. These findings encourage schools and the Pontianak City Education Office to strengthen internal controls, implement effective whistleblowing mechanisms, and enhance organizational commitment to prevent BOS fund misuse. Although employee competence does not directly impact fraud prevention, improving their capacity remains essential to ensuring transparent educational fund management. The study's limitations include a restricted geographic scope, a small sample size, and the absence of a comparative analysis between public and private elementary schools. Future research should involve a broader range of schools across different regions and consider additional factors such as organizational culture and information technology systems. The use of mixed methods and separate analyses for public and private elementary schools is also recommended to develop more precise and effective fraud prevention strategies.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN TESIS iii
PENGESAHAN TESIS iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
RINGKASAN x
SUMMARY xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Rumusan Masalah 17
1.3. Tujuan Penelitian 18
1.4. Kontribusi Penelitian 19
1.4.1. Kontribusi Praktis 19
1.4.2. Kontribusi Teoritis 19
1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian 20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21
2.1. Landasan Teori 21
2.1.1. Teori Segitiga Kecurangan *(Fraud Triangle Theory)* 21
2.1.2. Teori Keagenan *(Agency Theory)* 22
2.1.3. Kompetensi Pegawai 24
2.1.4. Sistem Pengendalian Internal 26
2.1.5. *Whistleblowing* 29
2.1.6. Komitmen Organisasi 33
2.1.7. Pencegahan Kecurangan *(Fraud Prevention)* 37
2.1.8. Moralitas Individu 38
2.1. Kajian Empiris 40
2.2. Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian 43
2.3.1. Kerangka Konseptual 43
2.3.2. Hipotesis Penelitian 44

BAB III METODE PENELITIAN 50
3.1. Bentuk Penelitian 50
3.2. Tempat Dan Waktu Penelitian 50
3.3. Data 51
3.4. Populasi dan Sampel 52
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 53
3.5.1. Variabel Dependen (Y) 53
3.5.2. Variabel Independen (X) 53
3.5.3. Variabel Moderasi (Z) 54
3.6. Metode Analisis 56
3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 57
3.6.2. Analisis Model Pengukuran *(Outer Model)* 57
3.6.3. Analisis Model Struktural *(Inner Model)* 58
3.6.4. Uji Hipotesis 59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 61
4.1. Hasil Penelitian 61
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif 61
4.1.1.1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin . 61
4.1.1.2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia 62
4.1.1.3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan 63
4.1.1.4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan 63
4.1.1.5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja 64
4.1.1.6. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Per Kecamatan 64
4.1.1.7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Sekolah 65
4.1.2. Analisis Model Pengukuran *(Outer Model)* 66
4.1.2.1. Validitas Konvergen *(Convergent Validity)* 66
4.1.2.2. Validitas Diskriminan *(Discriminant validity)* 68
4.1.2.3. Uji Reliabilitas 68
4.1.3. Analisis Model Struktural *(Inner Model)* 69
4.1.3.1. Model Fit (Uji Kecocokan Model) 69
4.1.3.2. Koefisien Determinasi (R^2) 70
4.1.3.3. *Predictive Relevance* (Q^2) 71
4.1.4. Uji Hipotesis 71
4.2. Pembahasan 74
4.2.1. Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS 75
4.2.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS 78

4.2.3. Pengaruh *Whistleblowing* Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS 80
4.2.4. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS 83
4.2.5. Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS 85
4.2.6. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi 88
4.2.7. Pengaruh *Whistleblowing* terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi 91
4.2.8. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan Dana BOS dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 97
5.1. Kesimpulan 97
5.2. Keterbatan Penelitian 99
5.3. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN 112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....40

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian 54

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 61

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia.....62

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....63

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan 63

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja.....64

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penyebaran Per Kecamatan 65

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Sekolah.....65

Tabel 4.8 Uji Validitas.....66

Tabel 4.9 Uji Validitas Diskriminan.....68

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas 68

Tabel 4.11 Indeks Ketepatan dan Kualitas Model Uji Model fit 69

Tabel 4.12 Uji Koefisien determinasi (R^2).....70

Tabel 4.13 Uji *Predictive relevance* (Q^2) 71

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 72

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....40

Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian 54

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin 61

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia.....62

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....63

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jabatan 63

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja.....64

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Penyebaran Per Kecamatan 65

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Sekolah.....65

Tabel 4.8 Uji Validitas.....66

Tabel 4.9 Uji Validitas Diskriminan.....68

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas 68

Tabel 4.11 Indeks Ketepatan dan Kualitas Model Uji Model fit 69

Tabel 4.12 Uji Koefisien determinasi (R^2).....70

Tabel 4.13 Uji *Predictive relevance* (Q^2) 71

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis 72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Kuesioner 112
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Kuesioner 118
Lampiran 3 Hasil Olah Data WarPLS 8.0 126

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien karena mencakup keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban serta pengelolaan kekayaan negara yang harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan menyebutkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan utama dalam pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan ini mencakup kewenangan umum dan khusus, yang sebagian besar didelegasikan kepada Menteri Keuangan serta pimpinan kementerian atau lembaga lainnya.

Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan negara, kewenangan Menteri Keuangan yaitu untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran serta pengawasan dan pengendalian anggaran, termasuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Keuangan juga berperan sebagai Bendahara Umum Negara, yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Selain Menteri Keuangan, pimpinan kementerian atau lembaga lainnya juga diberikan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) di unit kerja masing-masing berupa menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Pelaksanaan Anggaran Kementerian, Pelaporan Keuangan, dan Pengawasan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003).

Salah satu Kementerian di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan keuangan negara yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau disingkat Kemendikbudristek dengan memiliki tanggung jawab besar dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar dan menengah. Pengelolaan anggaran pendidikan Kemendikbudristek, merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah berkewajiban mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran Kemendikbudristek mencakup berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, dengan memiliki komponen penting alokasi anggaran seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Merdeka Belajar, dan Pembangunan Infrastruktur (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Menurut data Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020-2023 dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, perkembangan Anggaran Dana BOS dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, anggaran BOS tercatat sebesar Rp51,58 triliun, kemudian mengalami peningkatan tipis di tahun 2021 menjadi Rp52,56 triliun. Namun, di tahun 2022, terjadi penurunan anggaran menjadi Rp51,34 triliun. Pada tahun 2023, anggaran kembali meningkat menjadi Rp53,44 triliun, dan pada tahun 2024, anggaran melonjak signifikan hingga mencapai Rp59,49 triliun, yang merupakan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pergerakan anggaran ini menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, namun ada tren peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2023 hingga 2024. Kenaikan ini dapat mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat dukungan terhadap operasional sekolah, yang mungkin mencakup peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Alokasi anggaran pendidikan terkhusus pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang disalurkan oleh Kemendikbudristek dan dikelola langsung oleh satuan pendidikan masing-masing menjadi rentan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik dari unsur Kepala Sekolah, Bendahara Dana BOS maupun Guru yang saling berkerjasama. Hal ini seperti data yang disampaikan oleh *Indonesia Corruption Watch* (Sjafrina, 2024) bahwa pada 5 tahun terakhir adanya peningkatan yang signifikan terjadinya kasus kecurangan pengelolaan anggaran pendidikan dan jumlah tersangka dalam kasus tersebut. Fakta lain menyebutkan bahwa Korupsi pada anggaran pendidikan tidak pernah keluar dari posisi lima besar kasus korupsi yang sering terjadi. Sepanjang 2023, terdapat 30 kasus korupsi sektor pendidikan yang ditindak oleh penegak hukum. Sebanyak 40% dari korupsi anggaran pendidikan yang ditindak pada tahun 2023 tersebut, merupakan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kecurangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sektor pendidikan di sekolah telah menjadi perhatian serius (Mauludi, 2023). Tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah sering kali melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, dan Tenaga Tata Usaha, yang menggunakan wewenang untuk menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Kasus-kasus penyelewengan dana BOS di sekolah terjadi melalui berbagai modus, termasuk mark-up anggaran, penggunaan dana untuk keperluan di luar Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan laporan pertanggungjawaban fiktif (Dewi & Trisnaningsih, 2021).

Provinsi Jawa Barat, misalnya, menjadi salah satu daerah dengan tingkat korupsi dana BOS yang cukup signifikan, dengan berbagai kasus yang merugikan negara miliaran rupiah. Korupsi ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas sistem pendidikan yang seharusnya menjadi fondasi pembentukan moral dan karakter generasi muda (Liniarti, 2022). Dampaknya sangat merugikan masyarakat karena dana BOS yang diselewengkan mengurangi kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang seharusnya mendukung proses belajar-mengajar.

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2022 terjadi 220 kasus korupsi di sektor pendidikan. Dalam rentang waktu ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp1,6 triliun akibat korupsi di sektor tersebut (Prihastuti, 2019). Jumlah kasus korupsi terus meningkat, dari 23 kasus di tahun 2019, 29 kasus pada tahun 2020, 44 kasus di tahun 2021, dan melonjak menjadi 93 kasus di tahun 2022. Korupsi dana BOS menjadi modus paling umum, dengan banyak kasus ditemukan di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Barat (Mauludi, 2023).

Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah mencapai lebih dari 20% dari total belanja APBN, kualitas pelayanan pendidikan tetap rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) Indonesia yang stagnan pada peringkat belakang. Salah satu faktor yang menghambat peningkatan kualitas ini adalah tingginya tingkat korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, termasuk di antaranya Dana BOS, yang seharusnya secara langsung meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan (Sjafrina & Anggraeni, 2021).

Kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat menegaskan tingginya tingkat penyelewengan dana BOS, dengan beberapa contoh seperti di SMAN 5 Sukabumi, SMAN 3 Depok, SMAN 6 Cimahi, dan SMAN 1 Rancaekek. Di SMAN 5 Sukabumi, Kepala Dekolah dan Bendahara melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp519,720 juta. Sementara di SMAN 3 Depok, kerugian negara mencapai Rp2,7 miliar menurut hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat. Di SMAN 1 Rancaekek, ditemukan penyimpangan yang mencapai Rp4 miliar. Dan kasus serupa juga terjadi di SMAN 1 Cikarang, di mana terjadi mark-up anggaran belanja dana BOS sebesar Rp3 miliar. (Mauludi, 2024).

Selain kasus di Jawa Barat, korupsi dana BOS juga terjadi di Kalimantan Barat yaitu SMK Negeri 2 Singkawang berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, Pengadilan menyatakan Kepala SMK Negeri 2 Singkawang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp100juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp1,76 miliar.

Korupsi dana BOS ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai hak masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Kecurangan tersebut merusak kredibilitas institusi pendidikan yang seharusnya berperan dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas dan anti-korupsi (Agustiawan, Melati, & Rodiah, 2022). Kecurangan dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat memberikan dampak yang serius terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Salah satu dampak utamanya adalah terganggunya operasional sekolah. Dana BOS, yang seharusnya dialokasikan untuk keperluan pembelajaran, seperti pengadaan buku, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler, justru berpotensi disalahgunakan (Melinda, Nurhayati, & Purnama, 2023). Ketika dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, sekolah akan kesulitan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan (Putri, Kuntadi, & Pramukty, 2023).

Selain itu, kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan standar akuntansi pemerintah (Widyawati, Sujana, & Yuniarta, 2019). Ketika masyarakat, terutama orang tua murid, menyadari adanya penyelewengan dana, rasa percaya mereka terhadap integritas pihak sekolah dan standar akuntansi pemerintah sebagai penyedia layanan pendidikan akan menurun (Pardede & Simanjuntak, 2021). Hal ini dapat memicu skeptisisme publik terhadap program-program standar akuntansi pemerintah di bidang pendidikan, yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kecurangan ini juga berdampak pada ketidakmerataan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil yang sangat bergantung pada bantuan dana dari standar akuntansi pemerintah (Putri, *et al.*, 2023). Dana BOS merupakan salah satu

instrumen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah tertinggal yang sering kekurangan fasilitas (Utama & Astawa, 2021). Jika dana tersebut disalahgunakan, sekolah-sekolah di daerah ini tidak dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan mereka, sehingga memperlebar kesenjangan antara sekolah di kota besar dan daerah terpencil.

Dampak lainnya adalah rusaknya akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Pengelolaan dana BOS yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan aturan akan merusak integritas sistem pendidikan secara keseluruhan (Widyawati, *et al.,* 2019). Selain itu, kecurangan dalam pengelolaan dana ini juga membuka peluang untuk lebih banyak praktik korupsi di sektor pendidikan (Fathoni, Salsabilah, & Machdar 2024). Ini tentu bertentangan dengan upaya standar akuntansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik dan akuntabel, serta menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan yang dicanangkan oleh standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, penyalahgunaan dana BOS bisa berdampak pada proses penyaluran dana itu sendiri. Sekolah-sekolah yang terbukti melakukan kecurangan dapat dikenai sanksi berupa penundaan atau bahkan penghentian penyaluran dana di masa mendatang (Mauludi, 2023). Hal ini tentu akan merugikan siswa dan sekolah yang bergantung pada dana tersebut untuk melanjutkan kegiatan operasional mereka. Dampak ini tidak hanya merugikan sekolah, tetapi juga siswa yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Kecurangan dana BOS juga bisa memberikan dampak negatif pada moral tenaga pendidik dan siswa. Ketika guru dan staf sekolah menyaksikan praktik yang tidak jujur, motivasi mereka untuk bekerja dengan integritas dan dedikasi dapat menurun (Widyawati, *et al.,* 2019). Begitu juga dengan siswa yang menjadi saksi atau mengetahui kecurangan ini, mereka dapat merasa bahwa ketidakjujuran adalah hal yang wajar, yang dapat memengaruhi sikap mereka terhadap pendidikan dan kehidupan (Andriani, 2016).

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Salah satu faktor terpenting adalah kompetensi pegawai. Pegawai yang terlibat dalam

pengelolaan dana BOS harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prosedur keuangan dan regulasi terkait penggunaan dana tersebut. Kompetensi ini mencakup pemahaman tentang penganggaran, akuntansi, serta prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Putri, *et al.*, 2023). Jika pegawai kurang kompeten, peluang untuk melakukan kesalahan atau penyalahgunaan dana akan meningkat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Agustiawan, *et al.,* 2022).

Selain kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal juga berperan penting dalam pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal yang kuat mencakup prosedur pemeriksaan, pelaporan, dan audit internal yang dilakukan secara berkala. Prosedur-prosedur ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan dana sejak dini. Dengan adanya kontrol internal yang ketat, setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh sekolah dapat dipantau dengan baik, sehingga meminimalkan celah bagi kecurangan (Utama & Astawa, 2021).

Whistleblowing juga merupakan mekanisme penting dalam pencegahan kecurangan. Sistem *whistleblowing* memberikan saluran bagi pegawai atau pihak terkait lainnya untuk melaporkan indikasi kecurangan tanpa takut akan balasan atau sanksi. Hal ini bisa mendorong transparansi lebih besar dalam pengelolaan dana BOS karena memberikan perlindungan bagi pelapor yang beritikad baik (Melinda, *et al.,* 2023). Dengan adanya mekanisme ini, setiap pelanggaran atau indikasi kecurangan dapat segera diketahui oleh pihak yang berwenang dan ditindaklanjuti sebelum berdampak lebih jauh.

Faktor yang tidak kalah penting adalah komitmen organisasi. Komitmen dari pimpinan sekolah dan pihak terkait lainnya dalam mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel sangat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Ketika pimpinan memiliki komitmen tinggi terhadap integritas, maka budaya kerja yang menjunjung tinggi transparansi dan kejujuran akan tercipta (Megawati & Reskino, 2023). Komitmen ini harus diwujudkan dalam kebijakan yang tegas, seperti pemberian sanksi bagi pelaku kecurangan dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dalam menjaga integritas organisasi

Kompetensi pegawai menjadi salah satu faktor kunci dalam pencegahan kecurangan dana BOS, karena pegawai yang kompeten mampu mengelola dana dengan benar sesuai aturan yang berlaku. Kompetensi ini mencakup tiga aspek utama: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dari segi pengetahuan, pegawai harus memahami dengan baik regulasi, kebijakan, dan prosedur keuangan yang mengatur penggunaan dana BOS. Pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, mekanisme penganggaran, hingga tata cara pelaporan yang akuntabel (Melinda, *et al.,* 2023). Ketidaktahuan atau kekurangan pengetahuan dapat membuka peluang terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang bisa mengarah pada kecurangan.

Selain pengetahuan, keterampilan teknis juga sangat penting. Pegawai harus memiliki keterampilan dalam administrasi keuangan, seperti menyusun laporan keuangan yang benar, melakukan pembukuan, dan memverifikasi setiap pengeluaran. Keterampilan ini mencakup kemampuan menggunakan perangkat lunak akuntansi serta memahami bagaimana memantau dan mengevaluasi anggaran (Agustiawan, *et al.,* 2022). Jika pegawai tidak memiliki keterampilan ini, mereka mungkin tidak mampu mendeteksi penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan dana, yang pada akhirnya dapat mengarah pada terjadinya kecurangan.

Sikap atau etika kerja juga berperan besar dalam pencegahan kecurangan. Pegawai yang memiliki sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya lebih cenderung menjaga integritas dalam pengelolaan dana BOS. Sikap ini mencerminkan komitmen pegawai terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta menjaga agar tidak terlibat dalam praktik-praktik yang menyimpang (Pardede & Simanjuntak, 2021). Pegawai yang beretika tinggi akan lebih proaktif dalam melaporkan penyimpangan dan memastikan bahwa setiap prosedur diikuti dengan benar. Dengan demikian, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik akan membentuk kompetensi pegawai yang tangguh, yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana BOS.

Penelitian (Suhartono, Astrina, & Majid, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini dapat dijelaskan melalui fakta bahwa pegawai yang memiliki pengetahuan,

keterampilan, dan sikap yang baik lebih mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan integritas. Ketika pegawai memahami standar etika dan prosedur yang berlaku, mereka cenderung melakukan tindakan pencegahan terhadap kecurangan, baik melalui pengawasan yang ketat maupun pelaporan jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pegawai merupakan langkah krusial dalam membangun budaya organisasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian (Utama & Astawa, 2021) menunjukkan bahwa aspek variabel kompetensi pegawai juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pegawai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik, mereka lebih mampu mengenali dan mencegah potensi kecurangan di lingkungan kerja mereka. Kompetensi yang tinggi memungkinkan pegawai untuk menjalankan tugas dengan integritas dan akuntabilitas, serta meningkatkan kesadaran akan risiko kecurangan. Selain itu, pegawai yang terampil cenderung lebih berkomitmen untuk mematuhi prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang berkontribusi pada upaya pencegahan kecurangan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi SDM menjadi krusial dalam membangun sistem pengendalian yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan berintegritas.

Berbanding terbalik dengan penelitian (Kusumaningrum & Wulandari, 2023) menunjukkan temuan yang menarik bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini bertentangan dengan banyak penelitian sebelumnya yang menganggap kompetensi pegawai sebagai salah satu faktor kunci dalam mencegah kecurangan. Salah satu penjelasan untuk temuan ini mungkin terletak pada konteks spesifik yang diteliti. Dalam lingkungan tertentu, meskipun pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, faktor-faktor lain seperti tekanan dari atasan, budaya organisasi yang tidak mendukung, atau kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat mengurangi dampak positif dari kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian (Laksmi & Sujana, 2019) mengungkapkan bahwa kompetensi pegawai justru berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pengetahuan, keahlian, dan perilaku yang dianggap kompeten, hal tersebut tidak serta merta menjamin kemampuan mereka dalam mencegah kecurangan. Dalam konteks ini, kompetensi SDM yang seharusnya mendukung pemahaman tugas pokok, perencanaan, penganggaran, serta penyusunan laporan keuangan desa tidak berfungsi optimal. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki latar belakang kompeten pun dapat terjebak dalam praktik korupsi atau penyelewengan. Penelitian ini menekankan pentingnya tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga perlunya integritas dan komitmen yang kuat terhadap norma sosial dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah kecurangan, khususnya dalam pengelolaan dana BOS di sekolah. Pengendalian internal mencakup berbagai mekanisme dan prosedur yang dirancang untuk memantau, mengawasi, dan mengontrol aktivitas keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu elemen utama dalam sistem ini adalah adanya pemisahan tugas yang jelas, di mana tanggung jawab atas penyusunan anggaran, persetujuan, serta pencatatan dan pelaporan dikelola oleh individu atau bagian yang berbeda (Solihatunnisa & Hastuti, 2023). Pemisahan tugas ini mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang oleh satu pihak.

Selain itu, sistem pengendalian internal juga mencakup pengawasan berlapis, seperti audit internal dan eksternal. Dengan adanya audit rutin, baik yang dilakukan oleh pihak internal sekolah maupun auditor eksternal, setiap transaksi keuangan akan diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa semua pengeluaran dan pelaporan dilakukan secara transparan dan akurat (Suandewi, 2021). Pengawasan ini juga berfungsi sebagai *deterrent* bagi mereka yang mungkin berniat melakukan kecurangan, karena mereka tahu tindakan mereka dapat terdeteksi.

Sistem pengendalian internal juga mencakup verifikasi dokumen, seperti bukti pengeluaran dan laporan keuangan. Setiap pengeluaran harus didukung oleh

dokumen pendukung yang sah, dan dokumen tersebut harus diverifikasi oleh pihak yang berwenang sebelum pengeluaran dilakukan. Proses ini memastikan bahwa dana BOS hanya digunakan untuk tujuan yang sah dan sesuai anggaran (Rahmadani, Nugroho, & Martaseli, 2023). Dengan adanya pengendalian internal yang kuat dan efektif, peluang untuk melakukan kecurangan dapat diminimalkan, karena setiap langkah dalam pengelolaan dana berada di bawah pengawasan dan pemeriksaan yang ketat

Penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023) dan (Megawati & Reskino, 2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat meminimalkan peluang terjadinya *fraud* dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, prosedur yang jelas, dan pembagian tanggung jawab yang tepat di dalam organisasi. Dengan demikian, pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol, tetapi juga sebagai alat strategis dalam menjaga integritas keuangan dan mencegah penyimpangan yang merugikan.

Di sisi lain, penelitian (Kusumaningrum & Wulandari, 2023) dan (Solihatunnisa & Hastuti, 2023) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti implementasi yang tidak konsisten, kurangnya pelatihan bagi pegawai mengenai sistem yang ada, atau ketidakcocokan antara sistem yang diterapkan dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal merupakan elemen penting dalam pencegahan *fraud*, keberhasilannya sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut diterapkan dan diterima di dalam lingkungan organisasi. Kontradiksi hasil ini menggambarkan kompleksitas dalam hubungan antara pengendalian internal dan pencegahan kecurangan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam penelitian mendatang.

Whistleblowing berfungsi sebagai alat penting untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi di lingkungan sekolah, termasuk dalam pengelolaan dana BOS. Melalui sistem *whistleblowing*, pegawai atau individu lain

dapat melaporkan tindakan yang mencurigakan atau tidak etis tanpa takut akan konsekuensi negatif. Laporan dari *whistleblower* seringkali menjadi sumber informasi yang krusial dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin tidak terlihat oleh pengawasan formal (Anlilua & Rusmita, 2023). Dengan memfasilitasi saluran yang aman dan rahasia untuk laporan, sekolah dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang terjadi.

Pentingnya perlindungan bagi *whistleblower* tidak dapat diabaikan, karena tanpa perlindungan yang memadai, pegawai mungkin enggan untuk melaporkan kecurangan. Perlindungan ini mencakup jaminan bahwa identitas pelapor akan dirahasiakan dan tidak akan ada tindakan balas dendam terhadap mereka. Ketika individu merasa aman untuk melaporkan pelanggaran, hal ini dapat menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di sekolah (Liniarti, 2022). Dengan demikian, sistem *whistleblowing* yang efektif, disertai perlindungan yang kuat bagi pelapor, tidak hanya meningkatkan deteksi kecurangan tetapi juga berkontribusi pada pencegahan tindakan serupa di masa depan.

Penelitian (Megawati & Reskino, 2023), Romlah & Widyastuti (2024) dan (Laksmi & Sujana, 2019) mengungkapkan bahwa *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang aman dan rahasia bagi individu yang mengamati tindakan curang dalam organisasi. Dengan adanya mekanisme *whistleblowing* yang efektif, pegawai merasa lebih percaya diri untuk melaporkan penyimpangan, yang pada gilirannya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal, mencegah kerugian lebih lanjut dan memperkuat budaya integritas di dalam organisasi.

Sebaliknya, penelitian (Fathoni, *et al.,* 2024) dan Suandewi (2021) menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Penemuan ini mungkin mencerminkan faktor-faktor seperti kurangnya perlindungan bagi pelapor, rasa takut akan pembalasan, atau kurangnya dukungan dari manajemen untuk mendukung pelaporan. Dalam hal ini, meskipun *whistleblowing* diharapkan dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, tantangan dalam implementasinya dapat mengurangi efektivitasnya.

Kontradiksi antara hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan dan pemeliharaan sistem *whistleblowing* yang kuat dan dapat dipercaya agar dapat memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan kecurangan.

Komitmen organisasi terhadap prinsip-prinsip etika dan integritas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mencegah kecurangan, terutama dalam pengelolaan dana BOS. Ketika sekolah menetapkan nilai-nilai etika yang jelas dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan serta praktik sehari-hari, pegawai akan lebih termotivasi untuk bertindak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan (Utama & Astawa, 2021). Budaya organisasi yang kuat, yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab, dapat memperkuat perilaku etis di kalangan pegawai. Selain itu, ketika pimpinan menunjukkan komitmen nyata terhadap integritas, hal ini akan mempengaruhi sikap dan tindakan seluruh anggota organisasi (Pardede & Simanjuntak, 2021). Dengan demikian, budaya organisasi yang positif dan komitmen terhadap etika tidak hanya mencegah kecurangan tetapi juga membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.

Penelitian (Megawati & Reskino, 2023) dan (Anlilua & Rusmita, 2023) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa ketika organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap etika dan integritas, hal tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang jujur dan transparan. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong pegawai untuk mematuhi kebijakan dan prosedur yang ada, serta berperan dalam membangun budaya organisasi yang menolak segala bentuk kecurangan. Dengan kata lain, organisasi yang menempatkan nilai etika di tengah aktivitasnya cenderung lebih berhasil dalam mencegah tindakan curang.

Di sisi lain, penelitian (Laksmi & Sujana, 2019) dan (Melinda, *et al.,* 2023) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Temuan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya penegakan nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari, atau kurangnya keterlibatan pegawai dalam upaya menjaga integritas organisasi. Meskipun komitmen organisasi diharapkan dapat menjadi pendorong dalam pencegahan kecurangan, ketidakselarasan antara komitmen yang dinyatakan dan tindakan yang

diambil dapat membuat pengaruhnya menjadi tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam mengenai implementasi komitmen organisasi dalam praktik nyata untuk memahami dampaknya terhadap pencegahan kecurangan.

Moralitas individu berperan sebagai faktor moderasi yang signifikan dalam hubungan antara kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi dengan pencegahan kecurangan (Suhartono, *et al.,* 2023) dan (Megawati & Reskino, 2023). Aspek moralitas ini memengaruhi cara individu dalam mengambil keputusan, di mana pegawai yang memiliki nilai-nilai moral yang tinggi cenderung menolak untuk terlibat dalam tindakan kecurangan, meskipun terdapat peluang atau tekanan. Dalam konteks ini, moralitas dapat memperkuat upaya pencegahan kecurangan yang sudah ada, seperti sistem pengendalian internal yang baik, karena individu yang memiliki integritas akan lebih patuh pada prosedur dan norma yang ditetapkan (Pratini & Utama, 2016). Sebaliknya, jika moralitas individu lemah, maka faktor-faktor pencegahan lainnya mungkin tidak akan efektif, karena individu merasa tidak ada masalah dalam melakukan kecurangan (Suandewi, 2021). Dengan demikian, penguatan moralitas individu merupakan elemen krusial yang harus diperhatikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari kecurangan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa moralitas individu dapat memoderasi pengaruh kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023) menegaskan bahwa moralitas individu mampu memperkuat hubungan antara kompetensi pegawai dan pencegahan kecurangan, serta memberikan pengaruh positif pada sistem pengendalian internal. Selain itu, penelitian (Megawati & Reskino, 2023) juga mendukung argumen ini dengan menyatakan bahwa moralitas individu berperan dalam meningkatkan efektivitas *whistleblowing* dalam mencegah kecurangan. Kedua penelitian ini menunjukkan pentingnya aspek moralitas dalam menciptakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas.

Di sisi lain, terdapat penelitian yang berpendapat bahwa moralitas individu tidak memoderasi pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian (Kusumaningrum & Wulandari, 2023) menemukan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Hal serupa juga diungkapkan oleh (Laksmi & Sujana, 2019), yang menunjukkan bahwa moralitas individu tidak memiliki dampak moderasi yang kuat pada kompetensi pegawai dalam mencegah *fraud*. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya untuk memahami konteks dan kondisi di mana moralitas individu beroperasi, serta bagaimana faktor-faktor lain dapat memengaruhi pencegahan kecurangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suhartono, *et al.,* 2023) berfokus pada pengaruh kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di RSUD Lasinrang, sedangkan penelitian (Megawati & Reskino, 2023) mengkaji variabel serupa di sektor perbankan negara. Belum ada penelitian yang mengeksplorasi pengaruh variabel kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi dalam konteks pendidikan, khususnya pada pengelolaan Dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta. Lingkungan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pengelolaan dan potensi kecurangan, sehingga penelitian ini mengisi gap pada konteks tersebut.

Kedua, dalam variabel kompetensi pegawai, (Suhartono, *et al.,* 2023) menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh pada pencegahan kecurangan, yang dimoderasi oleh moralitas individu. Sementara itu, (Megawati & Reskino, 2023) tidak memasukkan kompetensi pegawai sebagai variabel, lebih berfokus pada pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi. Kombinasi variabel kompetensi pegawai dan *whistleblowing* dalam satu model penelitian untuk mencegah kecurangan pada Dana BOS belum pernah dikaji.

Selanjutnya, variabel *whistleblowing* dalam penelitian ini dianggap sebagai mekanisme penting untuk mengawasi dana BOS di sekolah dasar, yang belum diangkat dalam penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023). Selain itu, komitmen organisasi yang dinilai signifikan oleh (Megawati & Reskino, 2023) dalam konteks perbankan

juga belum pernah dikaji dalam konteks pendidikan dasar. Komitmen organisasi di sekolah dasar memiliki tantangan tersendiri dalam memastikan integritas dan transparansi penggunaan dana publik.

Sehingga, moralitas individu sebagai variabel moderasi belum diteliti dalam lingkungan pendidikan dasar dalam memoderasi pengaruh variabel kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023) berfokus pada pengaruh kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan di rumah sakit, sementara (Megawati & Reskino, 2023) mengeksplorasi variabel pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi dalam konteks perbankan. Penelitian ini, berbeda dari keduanya, dilakukan dalam lingkungan pendidikan, yaitu sekolah dasar negeri dan swasta, dengan fokus khusus pada pencegahan kecurangan Dana BOS, yang merupakan dana bantuan operasional pendidikan dari standar akuntansi pemerintah. Kombinasi variabel yang diteliti juga lebih luas, mencakup kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi secara bersamaan, yang dimoderasi oleh moralitas individu.

Rujukan pertama dalam penelitian ini adalah penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023) yang mengkaji kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen, pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen, dan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Sementara itu rujukan relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Megawati & Reskino, 2023) yang mengkaji pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan komitmen organisasi sebagai variabel independen, pencegahan kecurangan sebagai variabel dependen, dan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Adapun unsur kebaruan atau novelty pada penelitian ini yaitu dengan cara mengintegrasikan variabel-variabel dari kedua penelitian terdahulu, yaitu kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal dari penelitian (Suhartono, *et al.,* 2023) serta variabel *whistleblowing* dan komitmen organisasi dari penelitian (Megawati & Reskino, 2023) sebagai variabel independen. Jika rujukan pertama dilakukan di RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang atau sektor kesehatan dan rujukan kedua dilakukan di Bank BUMN Kantor

Pusat atau sektor perbankan, maka penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami faktor-faktor pencegahan kecurangan di sektor pendidikan, yang memiliki tantangan pengawasan yang berbeda dibandingkan sektor kesehatan dan perbankan.

Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Pengaruh Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing*, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Bos Dengan Moralitas Individu Sebagai Moderasi (Studi Empiris Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Di Kota Pontianak)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi pegawai berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana BOS?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana BOS?
3. Apakah *Whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana BOS?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dana BOS?
5. Apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan pencegahan kecurangan dana BOS?
6. Apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan dana BOS?
7. Apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan kecurangan dana BOS?
8. Apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan pencegahan kecurangan dana BOS?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara kompetensi pegawai dengan pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara komitmen organisasi dengan pencegahan kecurangan dana BOS di sekolah dasar negeri dan swasta

1.4. Kontribusi Penelitian

Berikut adalah kontribusi dari penelitian ini:

1.4.1. Kontribusi Teoritis

1. Pengembangan Teori Pencegahan Kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan, dengan mengintegrasikan faktor-faktor seperti kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi dalam konteks pendidikan.
2. Peningkatan Pemahaman Moralitas Individu. Penelitian ini juga diharapkan akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran moralitas individu sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor di atas dengan pencegahan kecurangan.
3. Penyusunan Kerangka Kerja. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu menyusun kerangka kerja yang jelas untuk analisis kecurangan dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1. Rekomendasi untuk Pihak Sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan pengelola dana BOS, dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah kecurangan.
2. Peningkatan Kesadaran Etika. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam pengelolaan dana BOS, serta mendorong budaya *whistleblowing* yang aman dan terbuka di lingkungan sekolah.

3. Kebijakan dan Strategi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pencegahan kecurangan dana BOS yang lebih baik di institusi pendidikan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada Bendahara BOS di Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta yang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kota Pontianak dipilih karena merupakan salah satu daerah dengan beragam sekolah yang mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga dapat memberikan perspektif yang bervariasi mengenai pengelolaan dan pencegahan kecurangan dalam penggunaan dana tersebut.

Subjek dari penelitian ini adalah para bendahara BOS yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah tersebut. Mereka merupakan individu yang memiliki peran penting dalam penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan dana, sehingga pemahaman dan kompetensi mereka sangat krusial dalam mencegah kecurangan.

Produk penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan Dana BOS yang mencakup seluruh proses dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor seperti kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, *whistleblowing*, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS serta sejauh mana moralitas individu dapat memoderasi hubungan-hubungan tersebut.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama lima bulan, dari Agustus 2024 hingga Desember 2024. Periode ini memberikan waktu yang cukup untuk pengumpulan data melalui survei, analisis data, serta penyusunan laporan penelitian.